

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa: Pada dasarnya kekuasaan politik menurut Islam tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT yang hakiki manusia hanya merupakan pemegang amanat dari Allah, manusia diberi tanggung jawab atas kekuasaan hanya untuk menjaga kemaslahatan dan juga kesejahteraan umat di muka bumi ini dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pemerintah dalam kedaulatan pemerintahannya harus mengatur politik dan kebijakannya secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui bersama pemikiran seorang tokoh suatu negara sangatlah diperlukan dalam membangun sebuah konsep politik yang dinamis dalam hal ini telah diterapkan oleh Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla merupakan seorang pemikir yang berbeda negara, akan tetapi keduanya menyadari bahwa seorang ilmuwan harus mempunyai tanggung jawab politik terhadap bangsanya.

1. Dalam pemikirannya Ulil memberikan desain politik itu jelas tidak dibangun dalam suatu ruang kosong terhadap prasangka dan kepentingan tertentu. Setidaknya, desain itu dibangun melalui berbagai persangka berdasarkan pengalaman masa lampau : umat Islam dianggap kurang menunjukkan loyalitas politik terhadap ideologi nasional atau setidaknya, umat ingin memberikan semacam tafsir tersendiri terhadap ideologi itu di luar tafsir resmi yang dilakukan oleh penguasa sebagai warisan dari kebobrokan sistem pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Jika kita menghendaki suatu perubahan politik di Indonesia, maka kita mesti rela untuk menyusun suatu prinsip minimal yang tidak mendiskriminasi banyak orang. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang agama, politik dan ekonomi dapat ditampung kedalam suatu tenda yang menghimpun berbagai keragaman. Selama rezim Orde Baru berkuasa, masyarakat politik di Indonesia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar membina praktik politik yang bersendi pada upaya penyelesaian problem-problem kongkret yang di hadapi mereka. Sementara proses industrialisasi kian memperumit serta memperluas berbagai dimensi soal yang muncul dalam masyarakat, wadah dan tempat untuk menyelesaikan pelbagai problem social-ekonomi sama sekali tidak memadai. Salah satu soalnya adalah karena asas yang dianut dalam penyusunan

lembaga-lembaga politik itu bukan untuk membuat solusi atas kenyataan yang kongkret, lembaga kepartaian yang mestinya menjadi sarana untuk mencapai solusi atas problem, direkayasa begitu rupa hingga akhirnya hanya menjadi sarana untuk mengesahkan dalih negara untuk menyembunyikan problem itu. Dengan memunculkan pendapat tentang Islam Liberalisme (kebebasan dan pembebasan), Ulil menginginkan adanya perubahan pada diri masyarakat Indonesia agar terlepas dari kesenjangan politik yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru.

2. Kemunculan gagasan pemikiran Hasan Hanafi politik juga mulai mengemuka dalam bentuk orientasi Islam revolusioner dalam hal ini pergulatan dalam pemikiran dan semangat peradaban yang terus menggejolak dalam diri Hassan Hanafi merupakan permulaan munculnya kesadaran politik. Bahkan kesadaran Hassan akan revolusi dan persatuan malah mendahului kesadaran akan perubahan sosial. Pemikiran Kiri Islam Hassan Hanafi secara umum adalah realitas umat Islam yang berada dalam keterlbelakangan dan ketertinggalan diberbagai aspek terhadap Barat. Kiri Islam hadir sebagai solusi yang kritis dalam menyikapi realitas tersebut. Poin pentingnya adalah mencari sebab-sebab kekalahan umat Islam. Berkaitan dengan masalah inferioritas umat Islam, Hassan menekankan pada pemberdayaan umat, terutama dari segi pola pikirnya. Adapun masalah superioritas Barat, Hassan menunjukkan bagaimana upaya untuk menekan superioritas tersebut. Islam bukan sebagai isntitusi penyerahan diri yang membuat kaum Muslimin menjadi tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan arus perkembangan masyarakat, tatapi Islam merupakan sebuah basis gerakan ideologis populustik yang mampu meningkatkan harkat martabat manusia. Proyek besar itu dia tempuh dengan gayanya yang revolusioner dan menembus semua dimensi ajaran keagamaan Islam.

B. Saran-saran

Pemikiran seorang tokoh merupakan manifestasi dari pergolakan pada diri dan lingkunganya dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian tidak salah ketika dalam perkembangan pemikiranya tidak konteks lagi. Hal di atas niscaya bagi pecinta politik terutama dalam konteks perkembangan bangsa dan negara untuk terus

melakukan kajian secara kritis terhadap sebuah pemikiran politik yang terjadi suatu negara.

Dengan melihat pemikiran atau gagasan Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla tentang pemikiran politik dalam konsep negara, yang sangat konstruktif ini maka yang lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikan gagasan tersebut di dalam masyarakat dan negara. Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan berideologi Pancasila masih terpolarisasi secara tajam antara yang menghendaki keterpisahan agama dari negara dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian perlu adanya pemikiran yang bisa menyatukan antara politik dan agama serta Pancasila. Adapun Bentuk realisasinya dalam mengembangkan suatu negara dengan mengikuti perkembangan zaman (modernisasi/kekinian) akan tetapi tidak serta menyingkirkan budaya dan tradisi bangsa.

C. Penutup

Akhirnya dengan segala kekhusyukan jiwa penulis haturkan sembah puja dan puji al-hamdulillahi rabbil 'alamin atas segala karunia berupa kemudahan dan keringanan-keringanan yang telah diberikan Allah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan proses penyusunan laporan penelitian ini. Tidak terlepas dari sikap manusiawi, tentunya karya ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai proses pembelajaran demi menuju perbaikan kualitas. Semoga di balik ketidaksempurnaan tersebut, karya ini mampu dan dapat memiliki nilai guna dan manfaat bagi siapa saja, khususnya dalam pengembangan keilmuan dalam hal wacana politik serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.